

**PERAN PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MEDAN
TAHUN 2024**

SKRIPSI

OLEH

**YURI SYAVIRA
208510016**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/2/25

**PERAN PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MEDAN
TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Medan Area



OLEH

YURI SYAVIRA

208510016

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/2/25

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : YURI SYAVIRA
NPM : 208510016
JUDUL : PERAN PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MEDAN
TAHUN 2024

Disetujui oleh,
Pembimbing

Dr. Walid Mustafa S., S.Sos, M.IP
Tanggal:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik

Ketua Program Studi

Dr. Walid Mustafa S., S.Sos, M.IP
Tanggal:

Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.SI
Tanggal:

Tanggal Lulus : 27 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 September 2024



Yuri Syavira

Npm: 208510016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
bawah ini:


Nama : Yuri Syavira
Npm : 208510016
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Peran Partai Amanat Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Medan Tahun 2024. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*).

Merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

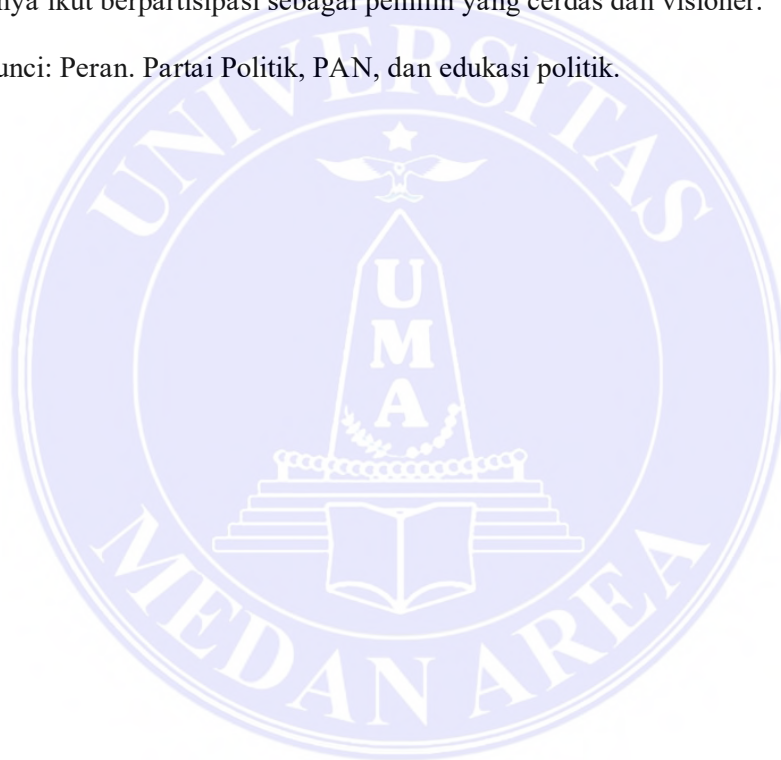
Dibuat di Medan,
Pada tanggal 27 September 2024
Yang menyatakan


Yuri Syavira
Npm: 208510016

ABSTRAK

Partai politik mempunyai kewajiban yuridis dan moral untuk melaksanakan pendidikan politik khususnya memberdayakan kader perempuan di tengah minimnya partisipasi politik perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan penelitian melalui teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran PAN sebagai salah satu partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum di Kota Medan belum optimal dan di dukung strategi kemitraan yang melibatkan ormas dan stakeholders terkait khususnya berkaitan dengan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya ikut berpartisipasi sebagai pemilih yang cerdas dan visioner.

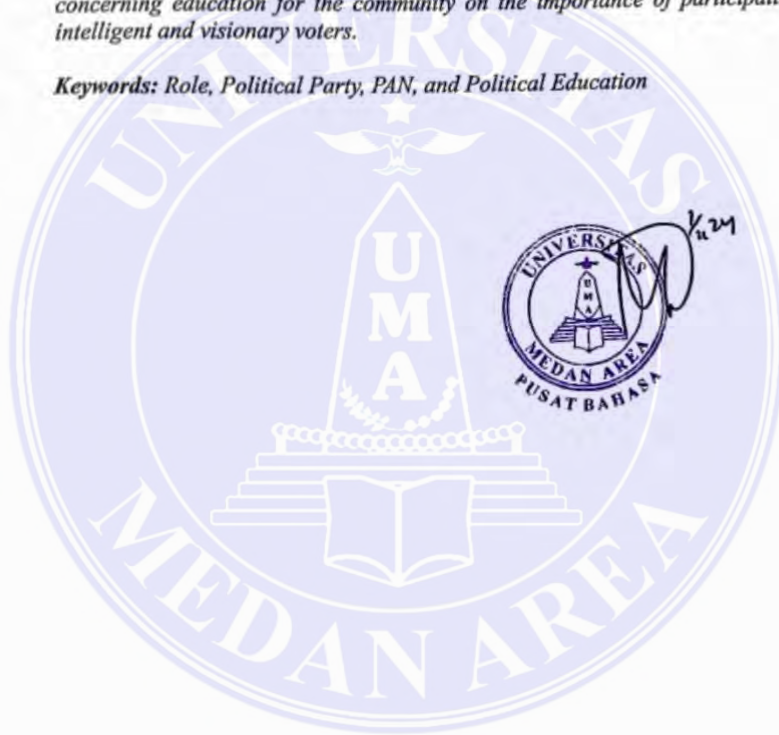
Kata Kunci: Peran. Partai Politik, PAN, dan edukasi politik.



ABSTRACT

Political parties have juridical and moral obligations to conduct political education, especially empowering female cadres amid the lack of female political participation. This research used a qualitative approach with descriptive method. The determination of research information was through purposive sampling technique with a total of 5 informants. The data validity testing technique used data source triangulation. The research results showed that the role of PAN as one of the political parties in increasing community political participation in the general elections in Medan City was not optimal and was supported by partnership strategies involving mass organizations and related stakeholders, especially concerning education for the community on the importance of participating as intelligent and visionary voters.

Keywords: Role, Political Party, PAN, and Political Education



RIWAYAT HIDUP

Penulis Skripsi ini Bernama Yuri Syavira lahir di Medan pada 02 Agustus 2002. Penulis adalah anak ke-dua terdiri dari tiga bersaudara dari pernikahan Bapak Chairul Amri S.E dan Ibu Yus Leli S.H. Tahun 2020 penulis baru menyelesaikan SMA di SMA Kartika I-2 Medan. kemudian Penulis melanjutkan kuliah di Universitas Medan Area pada Tahun 2020 di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang ata rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Amanat Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Medan Tahun 2024”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Selanjutnya, teririg doa dan ucapan terimakasih besar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.SC selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST.M.Si selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan area.
4. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Bapak Hikmawan Syahputra, S.IP, MA, selaku sekretaris penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dakam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

7. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Tercinta Chairul Amri, S.E,M.M. Terimakasih untuk segala hal yang telah kau korbankan untukku, Terimakasih atas keringat dan motivasimu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan ini. serta pintu surgaku, Ibunda Yus Leli, S.H. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang,doa,nasehat,serta atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap Langkah hidup penulis,yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan keluarga.
8. Kepada abang kandung saya ChairuNanda Yusri, Dan adik kandung saya Chandika Tri Ananta, dan kakak sepupu saya Genny Vivi Arianggi, S.AK serta kakak sepupu saya Indah Melinda, S.H terima kasih atas doa dan segala dukungan.
9. Bapak H.T.BahrumSyah,SH,MH. Selaku Ketua DPD PAN Kota Medan dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Terimakasih telah membantu selama penelitian penulis ini.
10. DPD Partai Amanat Nasional, atas kesediaannya menjadi tempat penelitian penulis dan dengan baik hati memenuhi kebutuhan data-data penulis dalam menulis skripsi.
11. Devi Riani dan Annisa Zachruni Hasibuan, selaku para sahabat penulis yang telah menemani penulis dari awal hingga saat ini, saling berbagai kebahagiaan maupun kesedihan serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Seluruh teman-teman stambuk 2020,stambuk 2021,stambuk 2022,stambuk 2023 Prodi Ilmu pemerintahan yang telah banyak memberikan doa serta motivasi kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu selama penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Agama Bangsa dan Negara. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2024

Penulis,



Yuri Syavira



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Peran dan Peranan	10
2.2 Partai Politik	13
2.2.1 Fungsi Partai Politik.....	15
2.2.2 Tujuan Partai Politik Dalam Undang-undang	17
2.3 Partisipasi Politik	17
2.4 Pemilihan Calon Legislatif	23
2.5 Peranan Partai Politik Dalam Pemilu.....	24
2.6 Penelitian Terdahulu.....	27
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Informan Penelitian	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.4 Teknik Analisis Data	35
3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian	36
3.5.1 Lokasi Penelitian.....	36
3.5.2 Jadwal Penelitian	36
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Sejarah Partai Amanat Nasional (Pan).....	38
4.1.2 Visi Dan Misi.....	40
4.1.3 Arah Perjuangan.....	40
4.1.4 Fungsi.....	41
4.1.5 Stuktur Organisasi	42
4.2 Hasil Pembahasan Peran Partai Amanat Nasional (Pan) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemelihan Umum Di Kota Medan	45

4.2.1 Peran Partai Amanat Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum	51
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR LAMPIRAN	63



DAFTAR GAMBAR

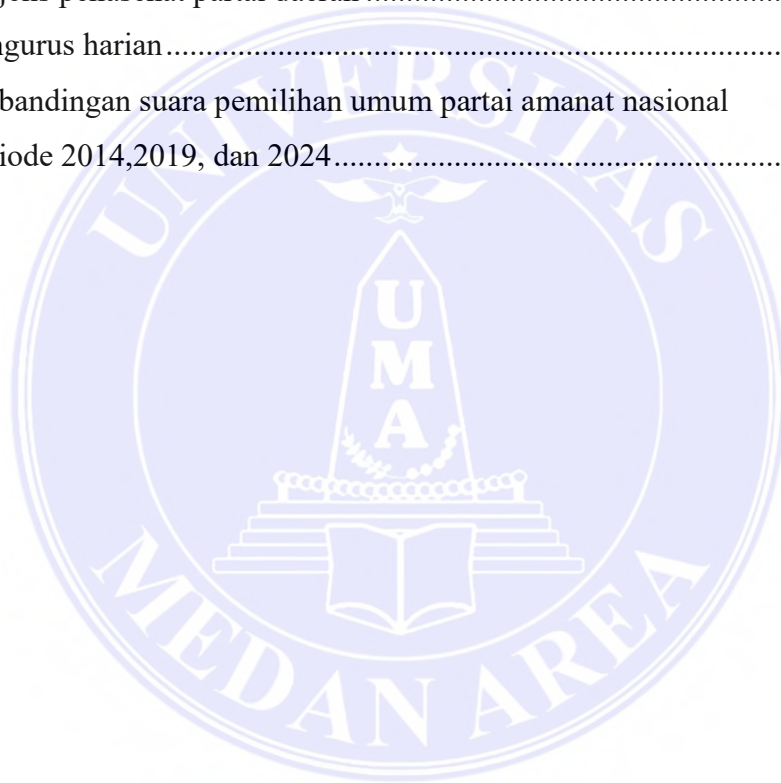
Halaman

1. Kerangka Berpikir.....	30
---------------------------	----



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Presentase Perolehan Kursi PAN Pada Pemilu Legislative 1999 Sampai 2019	5
2. Jumlah Penduduk Dan Surat Suara Pemilu Kota Medan.....	7
3. Penelitian terdahulu.....	27
4. Informan penelitian	32
5. Waktu penyelesaian skripsi.....	37
6. Majelis penasehat partai daerah	42
7. Pengurus harian.....	42
8. Perbandingan suara pemilihan umum partai amanat nasional Periode 2014,2019, dan 2024.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Obserfasi.....	63
2. Pedoman Wawancara	64
3. Surat Riset Lapangan	65
4. Surat Keterangan Selesai Riset	66
5. Hasil Obserfasi	67
6. Hasil Wawancara	68
7. Dokumentasi	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu atau pemilihan umum adalah suatu proses demokrasi dimana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya atau pejabat pemerintah. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem kekuasaan nasional berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Kekuasaan yang tercipta melalui pemilihan umum merupakan kekuasaan yang timbul dari bawah menurut kehendak rakyat, dan dilaksanakan menurut kehendak rakyat dan pemilihan kepala daerah.

Menurut Anwar Arifin dan Betham (1994), pemilihan umum merupakan syarat minimal suatu negara demokratis. Sistem demokrasi dikatakan efektif jika memenuhi beberapa ciri, seperti pemilihan umum yang adil dan teratur, akuntabilitas publik negara terhadap warganya, dan jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Diamond (2003) menulis dalam Anwar Arifin (2014: 78-79) bahwa demokrasi semakin dikaitkan dengan kebebasan bertindak dan berekspresi individu dan kolektif.

Menurut Huntington (1991: 9) (Arifin, 2014: 85), pemilu yang bebas merupakan definisi minimal dari demokrasi, saya harap memerlukan tindakan atau tindakan politik dari pemilih sebagai bagian dari partisipasi warga politik. Partisipasi warga negara dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi yang minim. Namun, akan selalu ada masyarakat yang tidak menggunakan hak politiknya dengan tidak mengikuti pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 198 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa “pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu dan telah berusia 17 tahun ke atas.” saya nyatakan. Lebih tua, sudah menikah, atau pernah menikah pada tanggal pemilihan. Menurut UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1(8) disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu nasional yang tetap dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilu.

Lembaga KPU ini mempunyai wilayah kegiatan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen dalam menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017. Sesuai tugas dan wewenangnya, KPU tidak terpengaruh oleh para pihak Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Jenderal dibentuk untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPU. Sekretariat adalah lembaga pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2011 yang menjamin penegakan hak politik masyarakat, diperlukan penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, kompeten, dan akuntabel kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasal 1 Pasal 27 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memuat keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu, dan partai politik merupakan warga negara yang otonom dan berperan untuk mencalonkan dan ikut serta dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan organisasi negara dan untuk memajukan kepentingan politik para anggotanya, partai tersebut harus menampilkan citra sebagai partai politik yang mempunyai kemauan dan cita-cita yang sama, yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok

warga negara., masyarakat, bangsa dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem politik negara, terutama dalam masyarakat Indonesia yang dinamis dan terus berubah. Peningkatan kapasitas dan kinerja partai politik akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan aspirasi dan kemauan masyarakat serta meningkatkan kualitas demokrasi, perlu dilakukan penguatan peran partai politik baik dari segi kapasitas, kualitas, dan kinerjanya. Kegiatan partai politik umumnya bertujuan untuk berperan sebagai pemangku kepentingan dengan berpartisipasi dalam departemen pemerintah, memantau tindakan dan kebijakan mereka yang berkuasa, dan menyajikan isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.

Partai politik adalah suatu organisasi negara yang diselenggarakan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia berdasarkan kepentingan politik partai tersebut, kekerabatan, kesepakatan kemauan dan niat untuk mengejar dan melestarikan nusa dan bangsa, serta menjaga keutuhan negara kesatuan. Didirikan dengan tujuan dan integritas Konstitusi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011).

Partai Amanat Rakyat juga merupakan partai baru yang masih bertahan bersaing di kancah politik Indonesia. Meski secara nasional PAN mengalami fluktuasi perolehan suara, namun PAN selalu berhasil melewati rintangan parlemen

(PT). Misalnya saja pada pemilu 1999, PAN memperoleh 7.528.956 suara (7,12%), atau setara dengan 34 kursi (7,36%), sehingga menempatkannya pada peringkat kelima setelah PKB. Pada pemilu 2004, PAN memperoleh 7.303.324 suara (6,44%) atau 53 kursi (9,64%) dan menempati peringkat ke-7. Pada pemilu 2009, PAN memperoleh 6.254.580 suara (6,01%) atau setara dengan 43 kursi (7,68%), menempatkannya di peringkat kelima mengungguli PPP. Pada Pemilu 2019, PAN menduduki peringkat ke-8 dengan perolehan 9.481.621 suara (7,59%), setara dengan 49 kursi.

Dari seluruh pengamatan, tampak jelas bahwa keberlangsungan PAN tidak hanya ditopang oleh besarnya basis cabang, khususnya dukungan umat Islam Muhammadiyah. Di sisi lain, kehebatan PAN juga didukung oleh keunggulan komunikasi politik dan kepartaiannya di mata masyarakat. Oleh karena itu, bab ini diawali dengan sejarah singkat perkembangan PAN, sebelum menguraikan komunikasi politiknya secara lebih rinci. Sebab sejarah dapat menjelaskan upaya dan langkah strategis yang dilakukan untuk membangun keamanan tersebut. Setidaknya sejarah perkembangan PAN akan menjadi tolak ukur ideologi, platform, program, bahkan langkah strategisnya.

Sejak tahun 1999, PAN menjadi salah satu kandidat dalam pemilu legislatif Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa suara untuk PAN relatif bervariasi dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Pada pemilu 1999, PAN menduduki peringkat ke-6 dalam perolehan suara nasional. PAN memperoleh 7.528.956 suara (7,12%) dan DPR sebanyak 34 delegasi. Citra PAN didukung oleh para intelektual pada masa kampanye pemilu yang memosisikan diri sebagai partai kelas menengah dan terpelajar. Selain itu, PAN berupaya membangun mereknya dengan memperkuat

semangat reformasi yang diungkapkan oleh berbagai lapisan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada pemilu 2004, PAN menduduki peringkat kelima dengan perolehan 53 kursi (6,44%). Pada tahun 2009, PAN memperoleh 46 kursi (8,2%), pada tahun 2014, PAN memperoleh 52 kursi (9,45%), dan pada pemilu terakhir tahun 2019, PAN memperoleh 44 kursi (6,84%).

Seperti dijelaskan di atas, perolehan suara dan nilai tukar yang diraih tentu saja jauh berbeda dengan perolehan suara partai-partai lama. Namun kenyataannya, PAN tetap hadir dalam persaingan politik Indonesia hingga pemilu 2019 dan hingga saat ini. Ketahanan tersebut terlihat dari perolehan kursi PAN yang terus meningkat sejak 1999 hingga 2019. Ekspresi ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Persentase Perolehan Kursi PAN Pada Pemilu Legislatif 1999 Sampai 2019.

Nama	%	%	%	%	%
Partai	Perolehan Suara Tahun 1999	Perolehan Suara Tahun 2004	Perolehan Suara Tahun 2009	Perolehan Suara Tahun 2014	Perolehan Suara Tahun 2019
PAN	(7,12%)	(6,44%)	(8,2%)	(9,45%)	(6,84%)

Sumber: Hasil Olahan KPU,2019

Total suara yang tercantum di atas adalah untuk seluruh negara bagian.

Namun di tingkat provinsi, seperti di Sumut, perolehan suara PAN juga berfluktuasi. Pada Pemilu 2004, PAN memperoleh 313.555 suara di 11 daerah pemilihan (dapir) dan mampu menempatkan kadernya pada delapan kursi (7,08%) di DPRD Sumut. Hal ini menempatkan PAN di peringkat ke-5. Pada tahun 2009, PAN menduduki peringkat kelima dengan perolehan 248.975 suara. Pada periode

tersebut, PAN menempatkan kadernya di tujuh kursi DPRD Sumut. Pada pemilu 2014, PAN memperoleh 420.447 suara dan menempatkan kader di enam kursi DPRD Sumut. Dan tahun lalu di tahun 2019, PAN menduduki peringkat ke-8 dengan perolehan suara sebanyak 317.280 suara. Pada periode tersebut, PAN menempatkan kadernya di delapan kursi DPRD Sumut. Situasi ini mengindikasikan penurunan jumlah kursi parlemen PAN.

Namun angka tersebut tidak menunjukkan penurunan lebih lanjut bagi PAN dibandingkan partai Islam lain seperti PPP dan PBB yang masih memperoleh suara lebih sedikit dibandingkan PAN. Meski PAN terlihat jelas mengalami penurunan akibat penambahan kursi DPRD di Sumut, namun dari perolehan suara terlihat jelas bahwa PAN mengalami peningkatan setiap kali diadakan pemilu. Bertambah atau berkurangnya kursi yang diraih disebabkan oleh bertambahnya jumlah daerah pemilihan menjadi 12.

Situasi di atas menunjukkan bahwa PAN tangguh dalam menghadapi persaingan politik Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Hal ini tidak terlepas dari upaya partai untuk terus membangun citra politiknya di masyarakat sebelum dan sesudah pemilu, sebagaimana terlihat dari statistik demografi dan jumlah pemilih pada tabel berikut.

Tabel 2 Jumlah Penduduk dan Surat Suara Pemilu Kota Medan

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH SUARA	
		2018	2023	2019	2024
1	Medan Tuntungan	85.613	100.132	63.582	
2	Medan Johor	132.012	154.868	106.049	
3	Medan Amplas	123.850	131.770	78.472	
4	Medan Denai	146.061	171.896	100.624	
5	Medan Area	98.992	118.057	76.454	
6	Medan Kota	74.439	84.778	70.147	
7	Medan Maimun	40.663	49.708	43.868	
8	Medan Polonia	55.949	60.679	19.143	
9	Medan Baru	40.663	36.191	29.626	
10	Medan Selayang	106.150	104.144	75.817	
11	Medan Sunggal	115.785	133.273	88.865	
12	Medan Helvetia	150.721	168.292	97.410	
13	Medan Petisah	63.374	72.432	52.377	
14	Medan Barat	72.683	89.248	64.774	
15	Medan Timur	111.420	117.035	83.050	
16	Medan Perjuangan	95.882	105.317	72.285	
17	Medan Tembung	137.178	149.274	95.272	
18	Medan Deli	181.460	191.743	112.613	
19	Medan Labuhan	117.472	135.469	78.981	
20	Medan Marelan	162.267	189.469	87.507	
21	Medan Belawan	98.113	110.238	63.242	
	TOTAL	2.210.624	2.474.166	1.579.354	

Sumber: Data Diolah (Kota Medan dalam Angka, 2019 dan 2024)

Berdasarkan tabel 1.2. Jumlah penduduk Kota Medan menurut kecamatan dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan Tahun 2018 sebesar 2.210.624, Sedangkan tahun 2023 sebesar 2.474.166. Jumlah suara pemilu Kota Medan dari tahun 2019 terdata sebesar 1.579.354, Sedangkan tahun 2024 belum tercantum.

PAN juga menampilkan dirinya di berbagai ajang politik sebagai partai terbuka yang memperjuangkan nasionalisme dan agama. Strategi pencitraan politik yang dilakukan PAN merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan hidup partai. Begitulah gambaran politik Hatta Rajasa yang mengartikan PAN dalam istilah teknis 'PAN Rakyat'. Begitu pula dengan jargon "perubahan" yang diperkuat oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN 2015-2020. Citra politik ini menunjukkan bahwa para pimpinan partai terus berupaya membangun citra

politik yang menarik agar masyarakat tetap mempercayai PAN dalam menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis juga ingin mengetahui seberapa sukses peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan parlemen. Disini penulis mempunyai data yang menarik untuk diteliti lebih lanjut **“Peran Partai Amanat Nasional dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Legislatif Kota Medan Tahun 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Partai Amanat Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif di Kota Medan?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Partai Amanat Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Partai Amanat Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsi upaya yang dilakukan Partai Amanat Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan khususnya Peran Partai Amanat Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif di Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas pentingnya edukasi politik dan memberikan wawasan yang baik, memperluas penerapan teori maupun praktik di lapangan terkait Peran Partai Amanat Nasional dalam meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif di Kota Medan.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai Peran Partai Amanat Nasional dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran dan Peranan

Interaksi sosial adalah fakta kehidupan baik individu maupun kelompok selalu terikat satu sama lain, maka fungsi setiap orang mempunyai dampak yang signifikan terhadap komunitas di mana mereka tinggal. Peran adalah kumpulan perilaku yang relatif seragam yang secara normatif dibatasi dan diantisipasi dari seorang individu yang menduduki posisi sosial yang dicapai atau diberikan dalam kerangka interaksi sosial. Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Teori peran adalah teori yang mewakili kombinasi berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater yang artinya seorang aktor harus memerankan tokoh tertentu dan diharapkan berperilaku tertentu dalam kapasitasnya sebagai tokoh tersebut. Selain itu, menurut Bruce J. Cohen (1992: 25), peran atau role terdiri dari beberapa bagian. Dengan kata lain:

1. Peran yang dimainkan adalah cara seseorang melaksanakan suatu peran.
2. Peran yang ditentukan mengacu pada cara masyarakat mengharapkan kita memainkan peran tertentu.
3. Konflik peran adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang menduduki satu atau lebih jabatan yang memerlukan pertentangan harapan dan tujuan peran.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Biddle dan Thomas (2015:224) bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan. harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja.

Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217) menyampaikan beberapa indikator Untuk mengetahui sejauh mana peran atau peranan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran,

- A. Expectation (harapan). Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.
- B. Norm (norma). norma merupakan salah satu bentuk harapan. menurut Secord & Backman, Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Secord & Backman Harapan normatif (prescribed role expectation) dibagi ke dalam dua jenis yaitu: pertama, harapan yang terselubung (covert) adalah harapan yang ada tanpa harus diucapkan. Kedua, yaitu harapan yang terbuka (overt) adalah harapan yang diucapkan.
- C. Performance (wujud perilaku). Wujud perilaku dalam peran. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda- beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah istilahnya menurut perilaku khusus.
- D. Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi). Penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran dimaksud. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif 10 menjadi positif. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri (Sarwono, 2015: 217-220).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini fungsi seseorang menjadi pusat tingkah lakunya ketika ia mempunyai status atau kedudukan untuk menjalankan suatu peran sesuai dengan harapan orang lain.

2.2 Partai Politik

Partai politik (palpol) mencerminkan peran masyarakat dalam kancah politik suatu negara, dengan kata lain tingkat partisipasi politik dalam masyarakat. Untuk memperoleh kekuasaan politik di suatu negara, partai politik mempunyai ciri-ciri independen secara finansial, mempunyai program dan arah politik sendiri, mengedepankan kepentingan kolektif dalam persoalan politik, dan berfungsi sebagai suprastruktur politik yaitu perangkat politik yang digunakan oleh elite politik. perkembangan politik. Partai politik merupakan lembaga yang menjalankan fungsi komunikasi politik dan harus mengintegrasikan pesan-pesan politik dengan permasalahan yang disampaikan kepada masyarakat. (Azhar, 2017) Di Indonesia yang fragmentasi politiknya meluas, tren demokrasi terus berkembang yang ditandai dengan munculnya banyak partai politik (sistem multipartai).

Munculnya sistem multipartai telah mengubah wajah politik nasional secara signifikan melalui munculnya partai-partai politik baru. Padahal, kemunculan partai politik baru tentunya akan semakin memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mewujudkan aspirasinya dan memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Situasi ini juga menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia menjadikan partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

Tumbuhnya partai politik di Indonesia diharapkan dapat membawa harapan bahwa partai tersebut dapat menjadi katalis positif bagi peningkatan aspirasi politik masyarakat. Namun kemunculan partai politik baru tersebut memerlukan upaya besar agar dapat diterima masyarakat. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang partai politik masih sangat bias terhadap partai-partai yang masih bertahan pada masa Orde Baru. Hal ini mendorong partai politik untuk melakukan pendekatan

kepada pemilih di tingkat akar rumput. Mengingat tingginya tingkat persaingan antar partai politik, maka perhatian khusus perlu diberikan pada upaya partai politik untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, peranan komunikasi politik dalam masyarakat sangatlah penting.

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2006 pasal 1, definisi partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Adapun fungsi dan tujuan partai politik sebagai berikut; Menurut Budiardjo (2003), ada empat fungsi partai politik yaitu :

- a) Sarana komunikasi politik dimana partai politik bertugas untuk menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpang siuran pendapat dimasyarakat.
- b) Sarana sosialisasi politik dimana partai politik dalam usahanya memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum Sarana rekrutmen dimana partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut.
- c) Sarana mengelola konflik dimana partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul dimasyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi.

Menurut Ramlan Surbakti (2006), tujuan partai politik adalah mewujudkan

kadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan kehidupan secara demokrasi berdasarkan UUD 1945. Milbrath dan Goel dalam Ramlan Surbakti menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi 2 faktor yaitu:

1. Faktor kesadaran politik yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.
2. Faktor kepercayaan kepada pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah. Masyarakat dapat menilai pemerintah sebagai instansi yang dapat dipercaya atau sebaliknya.

2.2.1 Fungsi Partai Politik

Menurut Michael G. Roskin (1997:202) Partai politik berfungsi sebagai alat penghubung rakyat-pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan warga Negara serta responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan dan keluhan masyarakat. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

- a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia.

- d) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Adapun fungsi Partai Politik lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Partai sebagai sarana komunikasi politik: Partai politik menjadi tempat rakyat menyalurkan pendapat dan aspirasinya.
- 2) Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik juga mencakup proses menyampaikan norma-norma kepada masyarakat serta berusaha menciptakan image (citra) di mata masyarakat bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum.
- 3) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Melakukan rekrut anggota partai dan mengkaderisasinya dengan baik. Kaderisasi yang baik akan mewujudkan kader-kader partai yang berintegritas dan moralitas tinggi di dalam berpolitik dan menjalankan tugas serta fungsinya sebagai politisi.
- 4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management).

2.2.2 Tujuan Partai Politik Dalam Undang-Undang

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 6 (enam) menjelaskan mengenai tujuan partai politik adalah sebagai berikut:

Tujuan partai politik di Indonesia secara umum :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, tujuan partai politik secara khusus, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.2 Partisipasi Politik

Sebelum membahas peran apa yang dapat dimainkan oleh partai politik untuk menggerak partisipasi politik rakyat, terlebih dahulu akan didudukan apa yang dimaksud partisipasi politik dan mengapa warga negara tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik ? Secara konseptual partisipasi politik adalah kegiatan

warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau tidak efektif. Aktif berpartisipasi politik yaitu kegiatan individu warga negara mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang tidak hanya terbatas pada ikut voting (dalam pemilihan umum) dan menjadi patriot (mendukung negara dengan mengibarkan bendera nasional atau ikut upacara kemerdekaan), tetapi lebih dari pada itu termasuk melakukan diskusi-diskusi politik dan terlibat dalam gerakan protes.

Milbrath dan Goel mengajukan tiga bentuk partisipasi politik, yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan apatis, Partisipasi aktif dibagi dalam dua kategori, yaitu partisipasi konvensional dan tidak konvensional. "Mode" partisipasi tidak konvensional ini adalah protes, seperti bergabung dalam demonstrasi massa di jalanan, gerakan-gerakan kekacauan (huru hara), aksi protes menentang tindakan pemerintah yang secara moral dianggap salah, menolak untuk mentaati undang-undang atau kebijakan yang dianggap tidak adil, dan sebagainya.

"Mode" partisipasi konvensional adalah aktivitas masyarakat (seperti bekerja Bersama-sama menyelesaikan berbagai problem yang sedang dihadapi, membentuk suatu kelompok untuk bekerja dalam menyelesaikan problem local, aktif menjadi anggota suatu organisasi masyarakat, berhubungan dengan pejabat pemerintah berkaitan dengan isu social tertentu, dan sebagainya); aktivis partai dan pekerja kampanye (bekerja secara aktif untuk partai atau kandidat, mempengaruhi orang lain untuk partai atau kandidat, mempengaruhi orang lain untuk memilih, mengikuti pertemuan dan rapat-rapat partai, menyumbang uang bagi partai atau kandidat, bergabung dan mendukung suatu jabatan public, dan

sebagainya; komunikator (mencari informasi tentang politik, melibatkan diri dalam diskusi-diskusi politik, menyampaikan dukungan atau protes pada elit politik, dan sebagainya; spesialis kontak (seperti menghubungi pejabat pemerintah baik di daerah maupun pusat jika ada masalah khusus yang berkaitan dengan kepentingannya, dan sebagainya.

Sementara itu, “mode” partisipasi pasif adalah pemilih (*voters*) dan pecinta tanah air (*patriots*) seperti memilih secara teratur pada saat pemilihan, cinta negara, menunjukkan sikap patriotism dengan mengibarkan bendera, mengikuti parade, membayar semua pajak dan retribusi, dan sebagainya. Sedangkan “mode” apatis adalah ketidakaktifan dalam proses politik, seperti tidak menghadiri pemilu, tidak ikut aktif di berbagai.

Mengapa orang berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik? Mengapa sebagian orang rela mengorbankan waktunya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politiknya, sementara yang lain tidak? mengapa sebagian orang rela diterpa hujan dan terik matahari untuk memprotes suatu kebijakan politik pemerintah, sementara yang lain tampak tak acuh? Mengapa sebagian orang bersedia antri mengikuti proses pemilihan umum sementara yang lain tidak? Variabel-variabel apa yang dapat menjelaskan keaktifan atau ketidakaktifan seseorang dalam kegiatan politik? Pertanyaan-pertanyaan senada masih dapat dikembangkan jika kita bermaksud untuk melakukan kajian tentang partisipasi masyarakat. Jawaban terhadap pertanyaan diatas, tentu saja, cukup variatif.

Salah satu variabel yang lazim digunakan untuk menjelaskan keaktifan atau ketidakaktifan seseorang dalam kegiatan politik adalah kepercayaan politik.

Dalam literatur ilmu politik, konsep kepercayaan banyak digunakan untuk menjelaskan ketidakaktifan (*inactivity*) seseorang dalam dunia politik. Namun, menjelaskan ketidakaktifan dengan konsep kepercayaan selalu mengandung pengertian ganda: Pertama, ketidakaktifan dapat diinterpretasi sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai ekspresi atas perasaan keterasingan (*alienasi*); Kedua, ketidakaktifan juga dapat diinterpretasi sebagai ekspresi kepercayaan yang tinggi. Misalnya, ada bukti kuat bahwa partisipasi dalam sistem politik meningkat pada saat terjadi krisis.

Dengan begitu, ketidakaktifan seseorang menandakan bahwa mereka puas terhadap sistem politik yang ada, atau paling tidak mereka tidak khawatir terhadap keadaan yang ada. Pengaruh kepercayaan politik harus dikaitkan dengan efikasi (informasi politik). Jika seseorang mempunyai tingkat efikasi (informasi politik) tinggi dan merasa pemerintah sebagian besar tidak percaya (kepercayaan politik rendah), maka mereka akan menunjukkan derajat yang tinggi dalam aktivitas voting. Sementara itu, mereka yang tingkat efikasinya tinggi dan merasa sangat percaya terhadap pemerintah, maka akan menunjukkan derajat yang tinggi dalam aktivitas hak-hak sipil. Namun, jika variabel efikasi rendah, maka kedua hubungan ini tidak berlaku.

Variabel lain yang lazim digunakan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam proses politik adalah status sosial-ekonomi. Setidaknya ada tiga indikator yang biasa digunakan untuk mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat Pendidikan, tingkat pendapatan dan pekerjaan. Tesis utama yang biasa dipakai adalah, tingkat partisipasi politik (dalam pemilu misalnya) berkorelasi secara signifikan dengan tingkat Pendidikan dan pendapatan. Tesis ini sebenarnya

bermula dari banyaknya temuan penelitian tentang perilaku memilih, yang menunjukkan tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan penghasilan tinggi.

Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan, *“the best known about turnout is that citizens of higher social and economic status participate more in politics.”* Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi dengan keaktifan atau ketidakaktifan seseorang dalam kegiatan politik, khususnya pada saat pemilu. Pertama, tingkat Pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi dan aturan main yang ada. Kedua, pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga disbanding pekerjaan lainnya. Ketiga, pendapatan yang tinggi memudahkan orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses politik.

Disamping variabel-variabel di atas, variabel lain yang juga lazim digunakan untuk menjelaskan keaktifan atau ketidakaktifan seseorang dalam proses politik adalah variabel kepribadian atau penjelasan psikologis. Penjelasan psikologis pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu penjelasan-penjelasan yang lebih menitikberatkan factor kepribadian individual dan penjelasan-penjelasan yang lebih menitikberatkan orientasi kepribadian. Penjelasan factor kepribadian-individual melihat bahwa ketidakaktifan seseorang dalam kegiatan politik, terutama dalam kegiatan pemilu, disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung

untuk tidak aktif dalam politik. Sebab, apa yang diperjuangkan elit politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, para seseorang yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena menganggap kegiatan politik tidak berhubungan dengan kepentingannya.

Sementara itu, penjelasan psikologis yang lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian melihat bahwa ketidakaktifan disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih yang menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi. Perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung.

Anomi merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para orang semacam ini, keaktifan atau ketidakaktifan tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik sering kali berada di luar control masyarakat luas. Sebab, para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh di luar jangkauan masyarakat. Perasaan *powerless* inilah yang disebut sebagai anomi. Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomi. Alienasi merupakan

perasaan keterasingan secara aktif. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk aksi politik-politik nonkonvensional, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi, dan sebagainya.

Meskipun begitu, beberapa ahli menilai bahwa ketidaktertarikan terhadap sistem serta perasaan *powerless* dalam mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah bukanlah gejala psikologis, tetapi lebih disebabkan oleh struktur sosial dan kekuasaan yang tidak adil. Sherman dan Kolker mencatat, *“Another explanation for nonvoting is lack of interest in politics and certain people’s belief that they are powerless to influence political decisions. Such an orientation reflects not deepseated personality disorders but a healthy adaption to the reality of the unequal distribution of power in society.”* Beberapa faktor lingkungan (di luar variabel kepribadian atau penjelasan psikologis) yang mempunyai peran besar terhadap partisipasi politik seseorang, yaitu tingkat modernisasi suatu masyarakat, kondisi struktur sosial atau kekuasaan, tingkat mobilitas sosial, sistem politik atau aturan main, tingkat perkembangan demokrasi, dan sebagainya.

2.3 Pemilihan Calon Legislatif

Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah gubernur, bupati dan wali kota. Pemilihan pimpinan daerah secara langsung oleh rakyat dalam suatu daerah disebut PILKADA. Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau Pemilukada dilakukan secara tatap muka yang langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.

Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta walikota dan wakil wali kota untuk kota. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota. Sedangkan khusus untuk daerah Aceh, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh. Dalam penyelenggaraan PILKADA telah diatur dalam undang-undang Undang-undang (UU) Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut adalah dasar hukum penyelenggaraan PILKADA:

1. Undang-undang (UU) Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Penjelasan Pemerintah Daerah
2. PP pengganti UUD No. 3 TENTANG perpu No. 3 TAHUN 2005

2.4 Peranan Partai Politik dalam Pemilu

Peranan parpol selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilu demi terjaganya Persatuan dan Kesatuan bangsa. Dalam hubungan dengan KPU, maka peran parpol yang di harapkan adalah:

1. Bersinergi secara positif dengan KPU, dengan cara turut berpartisipasi aktif terhadap setiap pelaksanaan terhadap pemilu.

2. Membantu melakukan sosialisasi terhadap berbagai aturan tentang pemilu di internal parpolnya masing-masing, khususnya terhadap calon anggota legislatifnya.
3. Melakukan rekrutmen politik dan mampu memahami aspirasi masyarakat terhadap calon anggota legislatif.
4. Melakukan Pendidikan politik secara aktif kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.
5. Membantu KPU dalam rangka pencermatan data pemilih, agar data pemilih benar-benar akurat, valid dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
6. Meningkatkan pemahaman tentang etika dan budaya politik bagi caleg-calegnya, khususnya didalam pelaksanaan tahapan pemilu seperti kampanye dan lain-lain.
7. Bersama-sama KPU dan pemangku kepentingan pemilu lainnya, untuk menjaga kondisi masyarakat yang tetap kondusif, aman dan damai.
8. Beberapa peran parpol yang diharapkan terwujud dalam pileg, tentulah dimaksudkan agar pileg tersebut selain nantinya melahirkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas dan berkomitmen pada rakyat. Juga parpol tetap berupaya maksimal agar pileg berlangsung lancar, aman dan damai. Sumber:<https://mediaindonesia.com> (Diakses pada tanggal 16 november 2023 pukul 22.32 WIB).

Peranan Parpol dalam Pemilu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak terlepas dari tujuan dan fungsi

parpol dalam sistem politik demokrasi. Tujuan pembentukan Parpol ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk tujuan yang bersifat khusus, dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 2 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus Parpol yaitu:

- a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b) memperjuangkan cita-cita Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
- c) membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sedangkan fungsi Parpol sebagai sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik.

Jika disimak dari perspektif aturan (regulasi), maka peranan Parpol selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses Pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam hubungannya dengan KPU, maka peran Parpol yang diharapkan adalah :

1. Bersinergi secara positif dengan KPU, dengan cara turut berpartisipasi aktif terhadap setiap pelaksanaan tahapan Pemilu.
2. Membantu melakukan sosialisasi terhadap berbagai aturan tentang Pemilu di internal Parpolnya masing-masing, khususnya terhadap calon anggota legislatifnya.

3. Melakukan rekrutmen politik dan mampu memahami aspirasi masyarakat terhadap calon anggota legislatif.
4. Melakukan pendidikan politik secara aktif kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih
5. Membantu KPU dalam rangka pencermatan data pemilih, agar data pemilih benar-benar akurat, valid dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori dan metode penelitian, persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang digunakan, penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun/ Judul/ Sumber	Urain	Hasil	Persamaan Dan Perbedaan
1	Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna. Al-Balad: Journal of Constitutional Law Volume 1 Nomor 1 2019. Available at: http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad	Metode: Penelitian Deskriptif kualitatif T.Pengumpulan data :Wawancara Lokasi : Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur	Hasil dari penelitian ini adalah peran partai politik di Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Malang lebih terfokus kepada kader sedangkan pendidikan politik pada masyarakat belum terlaksana dengan baik.	Persamaan : Peran partai politik dalam mewujudkan pemilihan umum. Perbedaan : Fokus ke kader partai dan masyarakat di Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.
2	Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam	metode : deskriptif Kualitatif metode	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPU Kabupaten	Persamaan : Menggunakan metode penelitian kualitatif dan

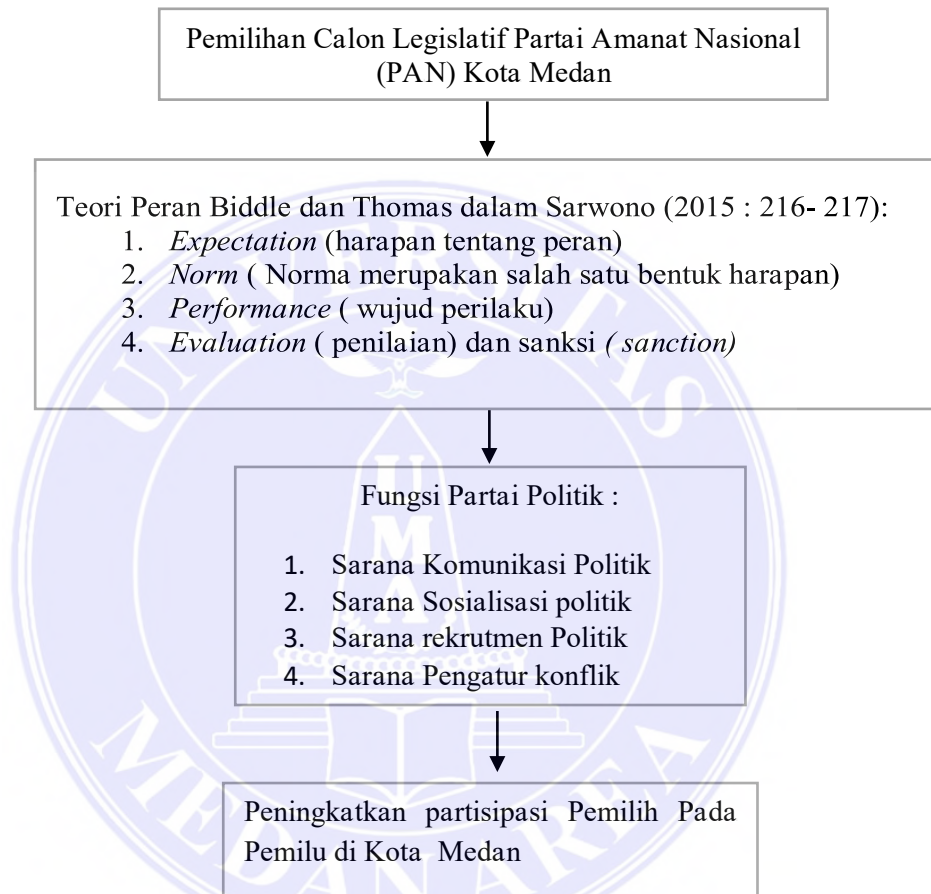
	<p>Pendidikan Politik untuk Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj</p>	<p>observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi.</p>	<p>Wonosobo dalam pendidikan politik untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilu serentak 2019 melakukan tahapan sosialisasi yang terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan KPU menyusun target sosialisasi yang terbentuk menjadi enam belas basis. Selanjutnya KPU menyusun metode sosialisasi sesuai dengan kebutuhan semua basis sasaran sosialisasi baik secara online maupun offline.</p>	<p>Teknik Pengumpulan data dan wawancara. Perbedaan : Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Pendidikan Politik untuk Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019.</p>
3	<p>Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 (Studi Di Desa Iligon Kecamatan Pinolosian Timur) Volume 3 No. 2 Tahun 2023 https://ejournal.unsra.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/47776</p>	<p>metode : penelitian kualitatif T.Pengumpulan data: Wawancara Lokasi : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian suara pada pilkada bolaang mongondow selatan di desa Iligon sudah termasuk baik, hal tersebut pengaruh dari tim sukses dan juga calon yang ditawarkan oleh partai politik, Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye ataupun rapat umum tak terlepas dari peran partai politik itu sendiri yang memberikan pendidikan politik.</p>	<p>Persamaan : Menggunakan metode penelitian kualitatif dan Teknik Pengumpulan data dan wawancara. Perbedaan ; Fokus ke Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 (Studi Di Desa Iligon Kecamatan Pinolosian Timur)</p>
4	<p>PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN</p>	<p>Metode : kualitatif Lokasi : Kabupaten</p>	<p>Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa partai politik mempunyai tugas</p>	<p>Persamaan : Peran Partai Politik dalam mewujudkan</p>

	<p>PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 9 DESEMBER 2015 DI KABUPATEN LABUHANBATU Vol.2 No. 1 September 2018 https://www.neliti.com/publications/319939/peranan-partai-politik-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-pada-pe</p>	<p>Labuhanbatu T.pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi</p>	<p>dan fungsi yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya sebagai wadah untuk berorganisasi ataupun untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang bertujuan untuk memenangkan dalam momen Pemilu atau Pilkada. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu serta hal-hal yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhan batu.</p>	<p>Pemilihan Umum Perbedaan : Fokus ke Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 Di Kabupaten Labuhan Batu.</p>
5	<p>Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Muda. https://www.neliti.com/publications/1144/peran-pendidikan-politik-terhadap-partisipasi-politik-pemilih-muda</p>	<p>Penelitian jenis kualitatif teori menurut Maran (2001: 135-136). Lokasi : Dikota Manado T.Pengumpulan data yaitu wawancara</p>	<p>hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik belum terlalu berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi sebagai sosialisasi politik. Pada Kenyataan kebanyakan pemilih muda bersikap acuh tak acuh walaupun mereka tetap ikut berpartisipasi dalam pileg 2014 di kota Manado.</p>	<p>Persamaan : Menggunakan metode penelitian kualitatif dan Teknik Pengumpulan data dan wawancara. Perbedaan : Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Muda di Kota Manado.</p>

2.3 Kerangka Bepikir

Uraikan latar belakang permasalahan penelitian, kaitkan dengan teori yang digunakan, tujuan penelitian yg ingin dicapai dan output penelitian.

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini berupaya memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh.

Menurut Wiliamas dalam Moleong (2007 : 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah sedangkan, Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mewakili tradisi khusus dalam ilmu-ilmu sosial dan pada dasarnya didasarkan pada pengamatan orang-orang di bidangnya masing-masing dan memperlakukan mereka dengan bahasa dan terminologi.

Melalui penelitian ini nantinya diharapkan mendapat deskripsi rinci kondisi empiris di lapangan tentang Peran Partai Amanat Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum di Kota Medan. sehingga informasi yang didapatkan komprehensif, faktual dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian. Menurut Bagong Suyatno (2005:172), informan meliputi jenis-jenis sebagai berikut:

1. Informan kunci, adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan memiliki segala macam informasi penting yang dibutuhkan untuk penelitian.
2. Informan utama adalah orang-orang yang secara langsung terkait dengan interaksi sosial yang dimaksud.
3. Informan tambahan adalah seseorang yang dapat memberikan data meskipun ia tidak langsung terlibat dengan komunikasi atau interaksi sosial yang diteliti.

Tabel 4. Informan Penelitian

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Ketua DPD PAN Kota Medan	1	Informan Kunci
2	Bidang Bapilu PAN Kota medan	1	Informan Utama
3	Masyarakat	3	Informan Pendukung
TOTAL		5	

Sumber : Data Diolah (2023)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019) Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada natural setting (kondisi yang alami), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi terstruktur atau terencana, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Hal ini dikarenakan data yang digunakan merupakan data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek. Widoyoko (2014:46) menjelaskan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap unsur-unsur yang ada pada gejala-gejala yang dialami subjek. Maka dalam penelitian ini observasi adalah salah satu tahapan yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat yang bersifat representative karena pada tahap ini penulis melakukan pengamatan langsung ketempat penelitian serta menyimpulkan segala kegiatan sosial yang ada pada tempat tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah dengan mengadakan tanya jawab dengan informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan keterangan atas subjek yang diteliti. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019:418), menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan untuk

mengetahui dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur dimana Peneliti mempersiapkan panduan berupa interview guideterlebih dahulu sebagai acuan selama proses wawancara. Sugiyono (2019) mengemukakan wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan kepada informan. Penulis Dalam penelitian ini selaku pewawancara yang akan memberikan pertanyaan kepada informan yang telah dipilih untuk mendapatkan data terhadap fokus penelitian. Informan wajib memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan pewawancara dengan lengkap dan mendalam, informan juga berhak untuk tidak menjawab pertanyaan apabila ia merasa bahwa pertanyaan tersebut mengandung informasi yang seharusnya tidak dipublikasikan. Berikut langkah-langkah dalam melakukan wawancara dalam penelitian

ini:

- 1) Menetapkan kepada siapa proses wawancara akan dilakukan.
- 2) Menetapkan pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan.
- 3) Menulis hasil wawancara.
- 4) Mengidentifikasi hasil wawancara

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film atau gambar, dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil dokumen berbentuk gambar.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Basrowi dan Suwandi dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif (2011: hlm 209-210), analisis data kualitatif dikemukakan oleh Miles dan Huberman pada prinsipnya analisis kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (1992) teknik analisis data mencakup tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrasian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian, dari awal hingga akhir penelitian. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan. Pada proses ini penulis melakukan pengumpulan data melalui proses awal yaitu melakukan observasi ke lapangan, wawancara dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi secara keseluruhan. Verifikasi kesimpulan juga dilakukan selama penelitian.

3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor DPD Partai Amanat Nasional yang berlokasi di Jalan. Al-Falah Raya No.1 Kelurahan Glugur Darat, I kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

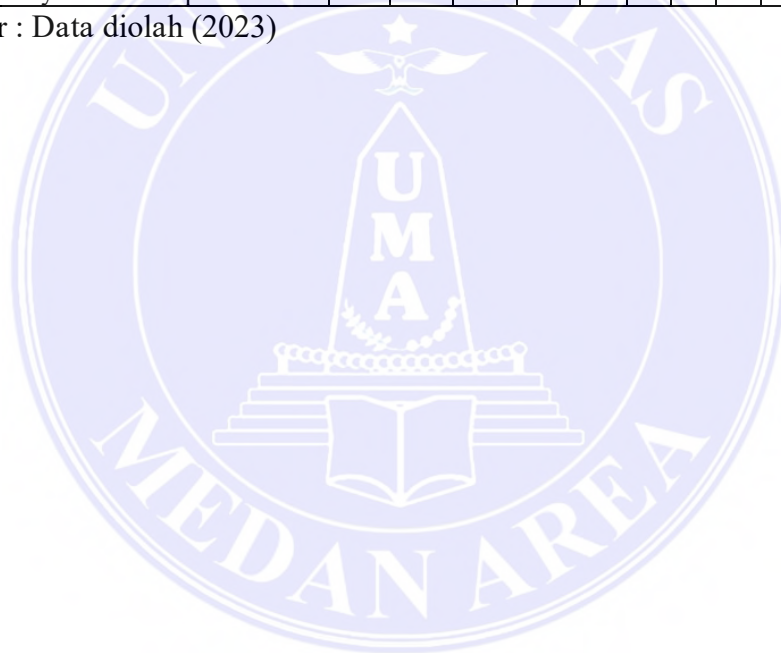
3.5.2 Jadwal penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan, proses penelitian dimulai dengan proses pengkajian literatur, penyusunan proposal, penyusunan instrumen hingga penyerahan final skripsi, seperti tabel berikut:

Tabel 5. Waktu Penyelesaian Skripsi

NO	URAIAN KEGIATAN	2023				2024								
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Pengumpulan data	■												
2	Pengimputan data dan penyusunan Proposal		■	■										
3	Bimbingan	■	■	■	■	■								
4	Pendaftaran Seminar Proposal				■									
5	Seminar Proposal					■								
6	Revisi Proposal dan Persiapan pedoman riset						■	■						
7	Permohonan surat riset								■					
8	Penelitian								■	■				
9	Pendaftaran Seminar Hasil										■			
10	Seminar Hasil										■			
11	Pendaftaran Sidang											■		
12	Sidang												■	
13	Penyerahan Skripsi													■

Sumber : Data diolah (2023)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Peran Partai Amanat Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum di Kota Medan belum optimal. Peran PAN sebagai salah satu partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum di Kota Medan perlu di dukung strategi kemitraan yang melibatkan organisasi masyarakat (Ormas) dan stakeholders terkait khususnya berkaitan dengan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya ikut berpartisipasi sebagai pemilih yang cerdas dan visioner.
2. Upaya yang dilakukan Partai Amanat Nasional Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum di Kota Medan, berupa sosialisasi, edukasi calon anggota di Kota Medan, belum di dukung seleksi dan ujian kompetensi kelayakan khusus dari lembaga sertifikasi/ independen. Namun telah di dukung pengawasan terhadap tindakan atau kebijaksanaan pemegang otoritas, dan berperan sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik (*political issue*) yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas. Serta mengaktifkan kembali kegiatan Partai di tengah-tengah masyarakat dengan cara memfungsikan mobil ambulance, mendukung pemerintah dalam penanganan dan mencegah Covid-19 dengan memfungsikan mobil untuk menyiramkan disinfektan, melakukan sosialisasi Undang-undang, melaksanakan reses anggota Dewan. Menciptakan PAN

milennial untuk para pemilihan pemula dan pemuda dengan cara membuat pertandingan olahraga, karya seni dan MTQ antar pelajar. Memperbaiki kaderisasi dengan menciptakan Kader yang pandai handal dan dipercaya

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Regional Sumatera Utara, khususnya Dapil Kota Medan perlu mempersiapkan Strategi Politik yang melibatkan para professional dalam penyusunan rencana kerja, dan mapping isu strategi politik, khususnya upaya meningkatkan kompetensi anggota dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui kemitraan, yakni menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi berbasis riset untuk menjaring aspirasi rakyat dan pengelompokkan isu, dan rencan kerja sesuai kebutuhan masyarakat/ isu strategis terkini.
2. Pemerintah Daerah Kota Medan, khususnya melalui dinas terkait seperti Bawaslu perlu melakukan edukasi politik, baik melalui kader partai politik, ataupun mitra. Kegiatan edukasi yang dilakukan dapat berupa Diklat Politik bagi anggota, dan masyarakat khususnya siswa/I kelas XII SMA/SMK sederajat, dan mahasiswa dengan melibatkan perguruan tinggi yang ada di Kota Medan. Harapan dari kegiatan tersebut, peningkatan kompetensi, pengetahuan masyarakat dalam mewujudkan smart citizen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Nugroho, F. T. (2023). Pengertian Pemilu, Tujuan, Fungsi, Asas dan Prinsip prinsipnya. *Bola.com*, Jakarta.
- Weber.(2001). *Peranan Partai Politik*; Cambridge.org,books
- Sabbil, Q. M. (2022). Peran Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional Kota Medan Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat.
- Teniwut, M. (2023). Fungsi Partai Politik dan Peranan dalam Pemilu. *Politik dan Hukum*, Banda Aceh.
- Moleong,L.J.(2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
- Sugiyono,S.(2010). Metode penelitian *Jakarta*: Rineka Cipta,173.
- Sugiyono. (2017). *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*.bandung; alfabeta
- Anshori, A. (2019). Pengaruh Budaya Dalam pesan Politik Terhadap Perilaku Pemilih Kota Medan Pada Pemilu Tahun 2019. In F.Junaedi & F.G.Sukmono (Eds.), *Komunikasi Politik di Indonesia*. Buku Litera.
- Azhar, A (2017). Pencitraan Politik Elektoral : Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat. <http://repository.uinsu.ac.id/1254/>
- Budiarjo,M. (1998).Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai.
- Henri. (2018). Keberadaan Hukum Partai politik. In *Angewandte Chemie International Edition*. Kencana
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*- Google Buku

Jurnal

- Fales, S. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif. *Partai politik, Partisipasi, Hukum*.Bandung;jurnal Pemerintahan dan Politik Islam,Al-Imarah
- Hasanudin. (2014). Peran Partai Politik Dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat.;Jurnal.Unri.ac.id,Nahkoda Riau

Sumber Online

- Wikipedia. (2011). Pengertian Pemilu. *Wikipedia* .
- Wikipedia. (2011). Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam kota medan.
- Muh. Iqbal Latief. (2016). Peran Parpol dalam Pemilu Legislatif.
Situs: *KPU.go.id*. (n.d). [https://jdih.Kpu.go.id/data_parpol/AD ART PAN 2019.pdf](https://jdih.Kpu.go.id/data_parpol/AD_ART_PAN_2019.pdf)
- Situs: PAN.or.id. (n.d).<http://pan.or.id/sejarah-pan/>

Undang – Undang

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 4.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Observasi

PERAN PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MEDAN TAHUN 2024

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Sarana dan prasarana
3. Sikap Petugas
4. Respon masyarakat

Instansi : Kantor DPD Partai Amanat Nasional
Kecamatan Medan Timur Kota Medan

Lokasi : Di Jl Al-Falah Raya No.1 Kelurahan Glugur
Darat I Kecamatan Medan Timur Kota
Medan, Sumatera Utara

Tanggal :

NO	YANG DIAMATI	YA	TIDAK	BUKTI/ INDIKATOR
1	Struktur organisasi			
2	Laporan Kinerja Program PAN			
3	Visi dan Misi			
4	Sikap Pengawai			
5	Sikap/Respon Masyarakat			
6	Sosial media instansi			
7	Sarana Prasarana : a) Ruang kerja b) Ruang tunggu c) Parkir d) Toilet e) Papan informasi f) Perangkat computer g) WIFI			

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan PERAN PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MEDAN TAHUN 2024 adalah sebagai berikut :

A. Identitas responden




1. N a m a :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....
2. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....
3. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....
4. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....
.....


LAMPIRAN 3

Surat riset lapangan

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id
Nomor : 1333/FIS.0/01.10/V/2024	Medan, 27 Mei 2024
Lamp : -	
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset	
 Kepada Yth, Ketua DPD PAN Kota Medan	
Di Tempat	
Dengan hormat, Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Yuri Syavira	
N P M : 208510016	
Program Studi : Ilmu Pemerintahan	
Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :	
<i>"Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum di kota Medan"</i>	
Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
Dekan,	
	
Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP	
Tembusan:	
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan	
2. Mahasiswa ybs	
3. Arsip	
	

LAMPIRAN 4

Surat keterangan selesai riset

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL**
(The National Mandate Party)
KOTA MEDAN
Sekretariat : Jln. Alfalah Raya No.1-A Telp. 061-8008 9978 - 081260525236 Medan

Nomor : PAN/02.01/B/K-S/060/VI/2024
Lamp : -
Perihal : Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset
a.n Yuri Syavira
Medan, 27 Juni 2024

Kepada Yth,
Sdrku. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

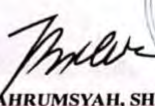
Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 1333/FIS.0/01.10/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset, maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang datanya sebagai berikut:


Nama	: Yuri Syavira
NIM	: 208510016
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul	: Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum di Kota Medan.

telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian pada Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Medan dengan baik.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL
KOTA MEDAN


HT. BAHRUMSYAH, SH. MH
Ketua


SUDARI, ST
Sekretaris

Pertinggal.-

LAMPIRAN 5

Hasil observasi

PERAN PARTAI AMANAT NASIONALDALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MEDAN TAHUN 2024

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Sarana dan prasarana
3. Sikap Petugas
4. Respon masyarakat

Instansi : Kantor DPD Partai Amanat Nasional
Kecamatan Medan Timur Kota Medan

Lokasi : Di Jl Al-Falah Raya No.1 Kelurahan Glugur
Darat I Kecamatan Medan Timur Kota
Medan, Sumatera Utara

Tanggal :

NO	YANG DIAMATI	YA	TIDAK	BUKTI/ INDIKATOR
1	Struktur organisasi	✓		Terdaftar di dokumen lampiran penelitian halaman 42
2	Laporan Kinerja Program PAN	✓		Agenda kinerja disampaikan di sub informasi public
3	Visi dan Misi	✓		Terdaftar di halaman 40
4	Sikap Pegawai	✓		1. Ramah 2. Sigap (cepat respon) 3. Indikator ini dilihat sejak peneliti melakukan penelitian sampai selesai penelitian
5	Sikap/Respon masyarakat	✓		1. Baik dan ramah 2. Pada wawancara ada masyarakat yang melakukan pengelolaan dengan sungguh-sungguh. Indikator ini dilihat dari hasil observasi dari beberapa informan
6	Sosial media instansi	✓		Ig : DPD PAN Kota medan Fb : DPD PAN Kota Medan
7	Sarana Prasarana : h) Ruang kerja i) Ruang tunggu j) Parkir k) Toilet l) Papan informasi m) Perangkat computer n) WIFI	✓		Sarana dan prasarana dilihat langsung oleh peneliti dan layak untuk digunakan.

LAMPIRAN 6

Hasil wawancara

PERAN PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MEDAN TAHUN 2024

Informan Kunci

A. Identitas resaponde.

1. Nama : H. T. bahrumsyah, SH, M.H
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Umur :
4. Pekerjaan : Pemerintahan
5. Pendidikan : Sarjana S2

B. Hasil Wawancara

1. Bagaimana perencanaan Partai PAN dalam meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan Umum di Kota Medan?

Jawab: 1. Strategi Kampanye

•Pemetaan Daerah Pemilihan: PAN mungkin melakukan pemetaan daerah pemilihan di Kota Medan untuk mengidentifikasi wilayah dengan partisipasi rendah dan merancang strategi khusus untuk wilayah

2. Program Sosial dan Kegiatan Masyarakat

•Kegiatan Sosial: PAN dapat meningkatkan kehadiran mereka di masyarakat melalui kegiatan sosial, seperti bakti sosial, pelayanan kesehatan gratis, dan program pendidikan yang dapat menarik perhatian dan simpati masyarakat.

Dengan berbagai pendekatan ini, PAN dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Medan.

2. Bagaimana Partai PAN menyampaikan informasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat pada pemilihan Umum di Kota Medan?

Jawab: Melalui penyuluhan, sosialisasi ke banyak tempat, dan menyampaikan berita informasi melalui sosial media.

3. Bagaimana strategi yang dilakukan Partai Amanat Nasional dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum?

Jawab: Strategi yang dilakukan PAN ini, PAN berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, sehingga dapat memperkuat demokrasi dan memastikan keterwakilan yang baik di pemerintahan.

PERAN PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MEDAN TAHUN 2024

Informan Utama

A. Identitas resaponden

1. Nama : Thendri Irawan Tanjung
2. Jenis Kelamin : Laki - laki
3. Umur ;
4. Pekerjaan :Bapilu DPD PAN Kota Medan
5. Pendidikan :

B. Hasil wawancara

1. Apa saja langkah telah disusun oleh Partai Amanat Nasional untuk Bakal Kemenangan Calon Legislatif Tahun 2024 ini?

Jawab: Ya pastinya banyak tetapi salah satu nya penetapan anggota calon legislatifnya dan penyuluhan ke warga sekitar.

2. Apa yang menjadi harapan ketika Partai Amanat Nasional menang dalam pemilihan Calon Legislatif tahun 2024?

Jawab: Ya menurut saya Harapannya semoga PAN dapat menjalankan amanah dengan baik dan mewujudkan satu persatu visi dan misinya dengan baik.

Apa solusi yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Calon Legislatif Tahun 2024?

Jawab: Solusinya berupaya melakukan sosialisasi warga Kota medan dan bagaimana tata cara pemilihan, dan mengajak masyarakat Kota Medan untuk berpartisipasi memberikan suaranya untuk pemilu.

PERAN PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MEDAN TAHUN 2024

Informan Tambahan

A. Identitas resaponde.

1. Nama : Muhammad Surya
2. Jenis kelamin : Laki - laki
3. Umur : 48
4. Pekerjaan : Wira Swasta
5. Pendidikan : SMA

B. Hasil wawancara

1. Mengapa partisipasi politik dari masyarakat sangat diperlukan dalam mengakseskan Pemilihan Umum di Kota Medan?

Jawaban : Karna menurut saya semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi pemilu secara otomatis juga semakin baik. Dan harapan saya dengan pekanya generasi melenia/gen Z akan kepemimpinan kepala daerah atau semacam yang akan membuat kebijakan yang bisa menentukan ruang aktif bagi mereka,yang mungkin kaum milenial/gen Z akan partisipasi dalam bentuk suara dan pengolaan pemerintah secara ikut bergabung untuk membangun suatu daerah tersebut.

2. Apa pandangan Bapak/Ibu mengenai penerapan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum?

Jawaban : Saya merasa kader PAN di daerah saya yang sebagai wakil rakyat terpilih sangat membantu dalam bentuk penyampaian aspirasi atau keluhan warga atas kekurangan dalam bentuk pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat anggota PAN atau wakil rakyat kader PAN sangat cepat untuk membantu dan seperti itu lah anggota PAN atau kader PAN yang sangat jadi panutan bagi masyarakat umum.

3. Bagaimana perilaku yang dilihat secara langsung terhadap Anggota Partai Amanat Nasional?

Jawaban : Karna Anggota Partai Amanat Nasional atau yang dimaksud kader PAN, dalam menyikapi perilakunya sudah sangat baik dan manfaat anggota PAN yang sudah terpilih menjadi Wakil rakyat terebut.

**PERAN PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF
DI KOTA MEDAN TAHUN 2024**

Informan Tambahan

A. Identitas resaponde.

1. Nama : Evy Maya
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Umur : 39
4. Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
5. Pendidikan : SMA

B. Hasil wawancara

1. Mengapa partisipasi politik dari masyarakat sangat diperlukan dalam mengakseskan Pemilihan Umum di Kota Medan?

Jawaban : Menurut saya sangat diperlukan karena masyarakat mempunyai banyak peran penting dalam melakukan atau mengakseskan pemilihan umum di Kota Medan

2. Apa pandangan Bapak/Ibu mengenai penerapan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum?

Jawaban : Bagi saya harus melibatkan warga agar warga dapat berpartisipasi serta ikut andil dalam kegiatan pemilihan umum seperti menjadi panitia TPS

3. Bagaimana perilaku yang dilihat secara langsung terhadap Anggota Partai Amanat Nasional?

Jawaban : Menurut saya, sejauh ini anggota Partai Amanat Nasional bagus dalam menjalankan visi misinya dalam bekerja, khususnya dalam Pemilihan Umum.

**PERAN PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF
DI KOTA MEDAN TAHUN 2024**

Informan Tambahan

A. Identitas resaponden

1. Nama : Nur Afni
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 45
4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
5. Pendidikan : SMA

B. Hasil wawancara

1. Mengapa partisipasi politik dari masyarakat sangat diperlukan dalam mengakseskan Pemilihan Umum di Kota Medan?

Jawaban :

Menurut saya sangat penting karena masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemilihan

2. Apa pandangan Bapak/Ibu mengenai penerapan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum?

Jawaban :

Penerapan itu sangat dibutuhkan untuk memilih siapa yang akan memimpin masyarakat kedepannya

3. Bagaimana perilaku yang dilihat secara langsung terhadap Anggota Partai Amanat Nasional?

Jawaban :

Menurut saya anggota Partai Amanat Nasional sudah menjalankan tugasnya dengan benar

LAMPIRAN 7

Dokumentasi Penelitian



Tampak Depan Kantor DPD PAN Kota Medan



Kondisi Ruang Rapat Kantor DPD PAN Kota Medan



Dokumentasi dengan Ketua DPD PAN Kota medan dan Wakil DPRD Kota medan **Bapak H.T. BHRUMSYAH, SH, M.H.** wawancara dilakukan pada selasa,02 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.



Suasana Pelayanan di Kantor DPD PAN Kota Medan



Dokumentasi dengan Bapak Thendri Irawan Tanjung, Selaku Bidang BAPILU DPD PAN Kota Medan, Wawancara dilakukan pada tanggal 17 juni 2024 pukul 10.00 WIB



Wawancara bersama Salah Satu Bapak muhammad Surya Sebagai Masyarakat (juni 2024, pukul 20.10 WIB)



Wawancara Bersama salah Satu Ibu Nur Afni Sebagai Masyarakat (juni, 2024 pukul 20.00 WIB)



Wawancara Bersama Salah Satu Ibu evy Maya Sebagai Masyarakat (juni 2024, Pukul 17.00 WIB)

